DINAS PENDIDIKAN
DKI JAKARTA

SUKSES JAKARTA UNTUK INDONESIA



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Jl. Gatot Subroto Kav. 40-41,
Kuningan, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12950

Jakarta
kota kolaborasi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia Nya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, LKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang, Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah, Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nahdiana
NIP 196908061992021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini melaporkan tingkat pencapaian strategis dan indikator kinerja utama tahun 2022 yang dikaitkan dengan Rencana Strategis tahun 2017-2022 dan RPJMD tahun 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki 36 Indikator Kinerja yang diperjanjikan, Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Sasaran Strategis						
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07	13,08	100,08%	Tercapai
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,20	11,31	100,99%	Tercapai
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91,00	91,02	100,02%	Tercapai
4	Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (KSD Nomor 1)	Persen	100	100	100%	Tercapai
5	Persentase penyelesaian Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (KSD Nomor 3)	Persen	100	97,75	97,75%	Tercapai
6	Persentase penyelesaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (KSD Nomor 5)	Persen	100	96,39	96,39%	Tercapai
7	Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (KSD Nomor 6)	Persen	100	100	100%	Tercapai
8	Persentase penyelesaian Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD (KSD Nomor 8)	Persen	100	100	100%	Tercapai
9	Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	Persen	100	100	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
10	Persentase penyelesaian Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KSD Nomor 13)	Persen	100	100	100%	Tercapai
11	Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	Persen	100	100	100%	Tercapai
12	Persentase penyelesaian Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (KSD Nomor 15)	Persen	100	100	100%	Tercapai
13	Persentase penyelesaian Sekolah Kolaborasi (KSD Nomor 37)	Persen	100	95,93	95,93%	Tercapai
14	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Persen	100	100	100%	Tercapai
15	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	Persen	100	100	100%	Tercapai
16	Persentase penyelesaian Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43)	Persen	100	100	100%	Tercapai
17	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Persen	100	99,50	99,50%	Tercapai
18	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Persen	100	100	100%	Tercapai
Sasaran Khusus						
19	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	Persen	100	123,24	123,24%	Tercapai
20	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik	Persen	82	98,05	119,57%	Tercapai
21	Persentase Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha / Dunia Industri	Persen	65	70,07	107,80%	Tercapai
22	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Hari	20	20	100%	Tercapai
23	Jumlah kolaborator Jakarta	Kolaborator	50	74	148%	Tercapai
24	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	Persen	30	30,97	103,23%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
25	Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi	Aplikasi	2	2	100%	Tercapai
26	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	39,79	39,79	Tidak Tercapai
27	Opini laporan keuangan daerah	Predikat	3	3	100%	Tercapai
28	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,	Persen	100	100	100%	Tercapai
29	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	91	93,79	103,07%	Tercapai
30	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai	95	95,97	101,02%	Tercapai
31	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang teRp.roses / terdisposisi	Persen	100	99,99	99,99%	Tercapai
32	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen	100	103,50	103,50%	Tercapai
Sasaran Operasional						
33	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%	Tercapai
34	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	100	83,84	83,84%	Tercapai
35	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	98,8	98,8%	Tercapai
36	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%	Tercapai

Berdasarkan Perjanjian kinerja dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) yaitu dari 36 indikator, 35 indikator tercapai dengan tingkat ketercapaian antara 83% hingga 123%, sedangkan 1 indikator pada sasaran khusus yaitu indikator Persentase Pemanfaatan e-Order tingkat ketercapaian terendah yaitu 39%.

Pada indikator Persentase Pemanfaatan e-Order tingkat ketercapaian terendah yaitu 39% dikarenakan perhitungan jumlah realisasi SP2D rekening makan minum juga memperhitungkan anggaran makan minum di satuan pendidikan, sedangkan pada satuan pendidikan pencairan dana BOP dilakukan per triwulan, sehingga realisasi

makan minum tidak bisa menggunakan sistem e-order yang harus dibayarkan maksimal 3 hari kerja.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka Dinas Pendidikan menjabarkan program kerja kedalam 5 program yang didukung dengan 19 kegiatan, Dengan hasil capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan cut off data 31 Desember 2022 seperti pada tabel berikut :

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	JUMLAH KEG
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2,122,879,896	2,055,000,000	96,80%	1
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	816,457,075,748	810,766,633,600	99,30%	1
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	361,013,722,780	361,011,070,000	99,99%	2
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7,918,861,404,138	7,603,282,267,174	96,02%	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,752,487,299,335	6,631,336,439,106	98,21%	8
Jumlah	15,850,942,381,897	15,408,452,040,380	97,21%	19

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. DATA UMUM ORGANISASI 1
B. STRUKTUR ORGANISASI 2
C. TUJUAN DAN SASARAN 6
D. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI 9
E. SUMBER DAYA MANUSIA 10
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN 10
BAB II 12
PERENCANAAN KINERJA 12
A. INDIKATOR KINERJA 12
B. PENETAPAN KINERJA/INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 12
BAB III 30
AKUNTABILITAS 30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 30
1. Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi 30
2. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya 45
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 47
4. Perbandingan dengan Target Nasional 48
B. REALISASI ANGGARAN 50
1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 50
2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program 52
3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja 53
BAB IV 55
PENUTUP 55
A. KESIMPULAN 55
B. SARAN 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dinas :

1. Tugas

   Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 277 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DKI Jakarta, disebutkan bahwa tugas pokok SKPD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

   "Menyelenggarakan Urusan pemerintah bidang Pendidikan",

2. Fungsi

   Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

   a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
   b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan;
   c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan pendidikan;
   d. Pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah, luar biasa, serta pendidikan Nonformal dan Informal;
   e. Pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, serta pendidikan Non formal dan Informal;
   f. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional kependidikan;
   g. Fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga dan/atau satuan pendidikan;
   h. Penyediaan pendidikan bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
   i. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang pelayanan pendidikan;
   j. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pendidikan;
   k. Pengawasan dan pengendalian izin di bidang pendidikan;
   l. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang pendidikan;
   m. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan;
   n. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Pendidikan; dan
   o. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumah-tanggaan Dinas Pendidikan;

p. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Pendidikan; dan

q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

GAMBARAN UMUM JUMLAH SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA SERTA AKREDITASI SEKOLAH TAHUN 2022

TABEL 1.1 DATA JUMLAH SEKOLAH TAHUN 2022

NO	JENJANG	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	PAUD& RA	167	4,925	5,092
2	SD& MI	1329	1,386	2,715
3	SMP& MTs	335	992	1,327
4	SMA, SMK& MA	212	950	1,162
5	SLB	13	76	89
6	PKBM	39	246	285
	Jumlah	**2,095**	**8,575**	**10,670**
	Persentase	**19,63%**	**80,37%**	**100%**

Sumber: Web Dapodik dan EMIS, 2022

TABEL 1.2 DATA SEKOLAH AKREDITASI TAHUN 2022

NO	JENJANG	A	B	C	TT	GRAND TOTAL
1	SD	1,777	382	30	7	**2,196**
2	SMP	718	319	17	4	**1,058**
3	SMA	382	99	5	2	**488**
4	SMK	280	263	26	0	**569**
5	SLB	38	40	9	1	**88**
JUMLAH		**3,195**	**1,103**	**87**	**14**	**4,399**
Persentase		**72,63%**	**25,07%**	**1,98%**	**0,32%**	**100%**

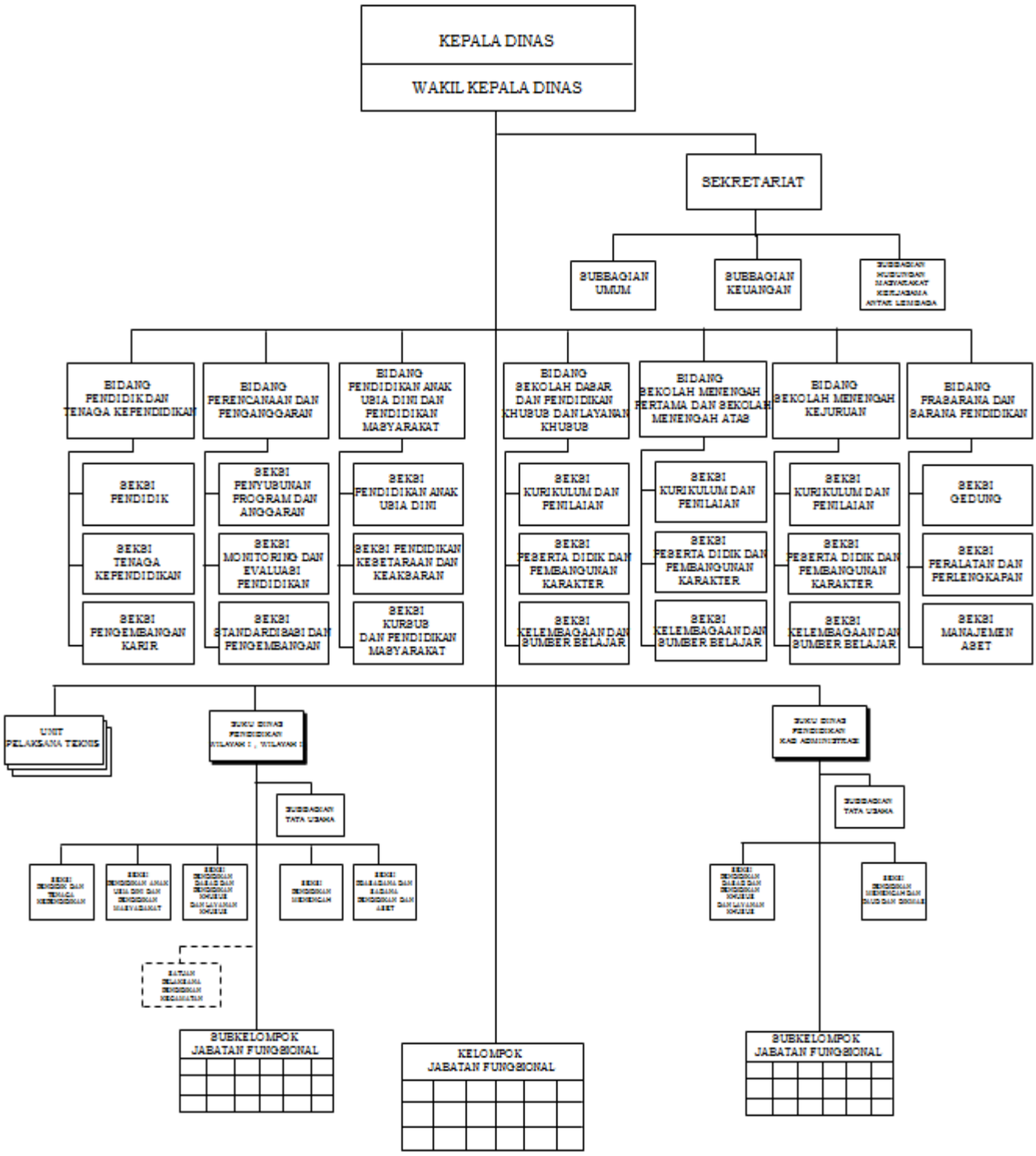
Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah,2022

B. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tersebut berikut Struktur Organisasi SKPD - Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pendidikan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Sekretariat, terdiri atas :
    a. Subbagian Umum;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga,
4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
    a. Seksi Pendidik;
    b. Seksi Tenaga Kependidikan; dan
    c. Seksi Pengembangan Karir,
5. Bidang Perencanaan dan Penganggaran, terdiri atas :
    a. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
    b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pendidikan; dan
    c. Seksi Standardisasi dan Pengembangan,
6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas :
    a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    b. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; dan
    c. Seksi Kursus dan Pendidikan Masyarakat,
7. Bidang Sekolah Dasar dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, terdiri atas:
    a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan
    c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar,
8. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, terdiri atas:
    a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
    c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar,
9. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas :
    a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
    c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar,
10. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan terdiri atas :
    a. Seksi Gedung;
    b. Seksi Peralatan dan Perlengkapan; dan
    c. Seksi Manajemen Aset,
11. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi;
12. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi;
13. Unit Pelaksana Teknis; dan
14. Kelompok Jabatan Fungsional,

Sehingga unit kerja perangkat daerah dibawah Dinas Pendidikan pada tahun 2022 yaitu:

NO	NAMA SKPD/ UKPD
	DINAS
1	Dinas Pendidikan
	SUKU DINAS PENDIDIKAN
2	Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta Barat
3	Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta Pusat
4	Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta Selatan
5	Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta Timur
6	Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta Utara
7	Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta Barat
8	Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta Pusat
9	Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta Selatan
10	Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta Timur
11	Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta Utara
12	Sudin Pendidikan Wilayah Kab, Kep, Seribu
	UNIT PELAKSANA TEKNIS
13	Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
14	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan
15	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
16	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan – Jakarta Barat
17	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan – Jakarta Pusat
18	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan – Jakarta Selatan
19	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan – Jakarta Timur
20	Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan – Jakarta Utara dan Kep, Seribu
21	SMANU Mohammad Husni Thamrin
	SMKN BLUD
22	SMKN 27 Jakarta
23	SMKN 36 Jakarta
24	SMKN 57 Jakarta
25	SMKN 13 Jakarta

NO	NAMA SKPD/ UKPD
26	SMKN 20 Jakarta
27	SMKN 24 Jakarta
28	SMKN 26 Jakarta
29	SMKN 32 Jakarta
30	SMKN 51 Jakarta
31	SMKN 63 Jakarta

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan utama pembangunan pendidikan di provinsi DKI Jakarta antara lain :

1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan sesuai prinsip-prinsip layanan prima;
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan di setiap sekolah di Jakarta;
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pendidikan;
4. Terwujudnya ekosistem sekolah yang mendukung proses pembelajaran dan pembinaan siswa berkarakter mulia, mandiri, cerdas dan peduli lingkungan;
5. Menjadikan setiap guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu dengan mewajibkan mereka mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh P2KPTK2 minimal 2 kali setahun secara rutin bagi setiap guru dan para tenaga kependidikan di seluruh sekolah di jakarta;
6. Menguatkan peran dan tanggungjawab P2KPTK2 sebagai pabrik guru dan tenaga kependidikan berkualitas dan profesional bagi semua guru dan tenaga kependidikan di seluruh jakarta, sehingga mereka mampu menjadi *the real educator, motivator dan inspirator* yang berkwalitas dan berkarakter mulia, dimana kepentingan dan masa depan murid yang cemerlang menjadi orientasi setiap pembelajaran di sekolah;
7. Terjamin dan tersedianya akses bagi seluruh warga DKI Jakarta termasuk kelompok minoritas dan kurang mampu secara ekonomi dalam memperoleh kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan;
8. Mempertahankan ketuntasan APK dan meningkatkan pencapaian APM pendidikan dasar;
9. Meningkatkan pencapaian APK dan APM pendidikan menengah;
10. Meratanya secara proporsional penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di pulau seribu;
11. Meningkatnya kualitas pembinaan karir profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan berkelanjutan;
12. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran sarana dan prasarana pembelajaran termasuk ICT antar wilayah dan antar SD dan SMP baik negeri maupun swasta secara adil dan proporsional;
13. Berkurangnya kesenjangan mutu lulusan antar sekolah;

14. Meningkatnya kompetensi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan;
15. Meningkatnya peran dan fungsi Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan (PPGTK);
16. Meningkatnya peran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Pusat Kegiatan Guru (PKG), Musyawarah Guru mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sebagai pusat kegiatan peningkatan kompetensi profesional pendidik dan kepala sekolah;
17. Meningkatnya kompetensi pengawas sekolah dalam pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik serta mewujudkan ekosistem sekolah yang mumpuni dan berintegritas sehingga para guru dan tenaga kependidikan berkinerja dan berdedikasi tinggi;
18. Meningkatnya kualitas rekrutmen, rotasi dan promosi kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis meritokrasi yang ketat, transparan, dan akuntabel;
19. Terwujudnya otonomi satuan pendidikan melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sekolah;
20. Berjalanya sistem *e-catalogue* yang meliputi semua pengadaan barang dan jasa Dinas pendidikan DKI Jakarta;
21. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah;
22. Terwujudnya pola kepemimpinan sekolah yang demokratis dan tidak diskriminatif;
23. Meningkatnya program kegiatan kesiswaan melalui kegiatan keilmiahan, keolahragaan, keagamaan, dan seni budaya yang kompetitif dalam rangka pencitraan publik;
24. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berfokus menumbuh suburkan *life skill, work skill* dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan siswa.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Menurunnya angka putus sekolah
2. Meningkatnya mutu lulusan
3. Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi guru
4. Mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, saling menghormati dan sesuai standar pendidikan nasional
5. Menjalankan pembelajaran yang menggunakan konsep student centred learning, integrated subject, dan adaptable sesuai tuntutan era industri 4,0 namun dengan tetap mengedepankan karakter mulia dan nasionalisme
6. Menghidupkan kegiatan lesson study berbasis sekolah (assesment- plan-do-reflection, kembali ke assessment, dst) bagi setiap guru agar kemampuan mereka dalam membuat perencanaan mengajar dan memberi pelajaran di kelas mampu meningkatkan pemahaman dan keunggulan siswa

7. Mengembangkan perangkat penilaian di sekolah yang lebih menghargai keunikan bakat dan minat setiap murid sekolah
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan pendidikan
9. Meningkatnya sarana prasarana belajar mengajar
10. Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah (daya tampung)
11. Menurunnya angka buta aksara
12. Meningkatnya pembinaan pendidikan kesetaraan
13. Meningkatnya standar kualitas layanan pendidikan
14. Meningkatnya pengembangan ICT dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan administrasi sekolah
15. Meningkatnya penyelenggaraan akreditasi dan mutu pendidikan
16. Meningkatnya pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
17. Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)
18. Terlaksananya proses pendidikan SMK yang menerapkan standar sesuai kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri
19. Menjadikan pulau seribu sebagai pusat SMK berbasis kelautan, wisata dan perhotelan bahari, perkapalan serta budaya lokal
20. Berjalanya BLUD di SMK, sehingga para lulusan SMK memiliki kemampuan dan etos kerja industri yang akan memudahkan mereka di serap oleh pasar kerja,
21. Mengimplementasikan sistem *e-catalogue* untuk semua pengadaan barang dan jasa secara konsisten dan akuntabel
22. Berjalanya reformasi birokrasi di setiap lini Dinas Pendidikan, sehingga tata kelola manajemen dan keuangan berjalan dengan tepat, efektif dan efesien tanpa kebocoran atau penyimpangan,
23. Menjalankan penilaian kinerja berdasarkan "*kontrak target kerja*" untuk setiap pejabat Dinas Pendidikan (termasuk para guru,kepala sekolah dan pengawas sekolah) yang dilengkapi dengan sistem *reward dan punishment*
24. Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan berbasis masyarakat meliputi pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup

Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dalam rencana strategis dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

TABEL 1.3 TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah
			Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

TABEL 1.4 PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase cakupan layanan e-gov
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui hibah
		Persentase pelaksanaan penyaluran hibah bansos pendidikan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang kompeten
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi
		Persentase angka partisipasi murni SD/MI
		Persentase angka partisipasi murni SMP/MTs
		Persentase angka partisipasi murni SMA/SMK/MA
		Persentase angka putus sekolah jenjang SD/MI
		Persentase angka putus sekolah jenjang SMP/MTs
		Persentase angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA
		Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta
		Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah
		Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus
		Persentase Sekolah terakreditasi A
		Persentase kelulusan jenjang SD/MI
		Persentase kelulusan jenjang SMP/MTs
		Persentase kelulusan jenjang SMA/MA
		Persentase kelulusan jenjang SMK
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SD/MI
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMP/MTs
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMK
		Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan (SNP)
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

D. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Tahun 2022 tidak dapat dipungkiri masih menjadi tahun penuh perjuangan dalam melewati wabah Covid-19 yang terjadi sejak Maret tahun 2020. Tak terkecuali bagi dunia pendidikan, salah satu bidang yang juga terkena imbas dari Covid-19. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini yang sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan harus melakukan adaptasi dalam menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik berupa kegiatan belajar mengajar dari yang semula berupa tatap muka di sekolah, menjadi pembelajaran dari rumah. Begitu juga penyediaan layanan pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berupa peningkatan kompetensi berupa pelatihan, yang semula dilaksanakan secara tatap muka di UPT P2KPTK2 5 wilayah atau UPT P3PAUDIKMAS, menjadi pelatihan melalui daring. Sarana

prasarana pun tak lepas dari perhatian, terutama yang berada di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan memastikan seluruh satuan pendidikan telah memiliki tempat cuci tangan serta tersedianya sabun cuci tangan, *handsanitizer,* dan cairan disinfektan, serta masker dan *face shield* cadangan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pegawai, baik yang merupakan jabatan struktural dan fungsional (guru) sebagai berikut :

TABEL 1.5 DATA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022

No	Jabatan	Data		Satuan
		Januari 2022	Desember 2022	
1	Jabatan Struktural	2,014	1,828	Orang
2	Jabatan Fungsional (Guru)	27,843	25,239	Orang
3	KKI Tenaga Kependidikan	9,344	9,321	Orang
4	KKI Pendidik	13,478	6,403	Orang
	Total	**52,679**	**42,791**	**Orang**

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Target Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022, realisasi tahun 2022 dan capaian kinerja tahun 2017-2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas data umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, struktur organisasi pernyataan visi, pernyataan misi, tujuan dan sasaran, isu strategis, dan sistematika penyajian laporan kinerja.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas

Menguraikan pengukuran kinerja 2022 berupa target capaian kinerja organisasi, realisasi capaian kinerja organisasi, perbandingan realisasi capaian dengan tahun sebelumnya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan perbandingan dengan target nasional, serta realisasi anggaran program yang mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan realisasi anggaran berdasarkan unit kerja.

Bab IV - Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian Kinerja organisasi.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (PK) tertuang didalam dokumen indikator Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, yang didalamnya terdapat sasaran, Indikator Kinerja dan Target.

B. PENETAPAN KINERJA/INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur teRp.ilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Visi Provinsi DKI Jakarta yaitu :

Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua

Adapun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengampu Misi 1 yaitu:

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, visi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah :

Mewujudkan Pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua

Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan yang tuntas, menyeluruh, cerdas secara komprehensif yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis serta berkarakter. Kompetitif dimaksudkan dalam rangka mengupayakan lulusan pendidikan untuk dapat berdaya saing global dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dapat bekerja di mancanegara.

Visi yang disebutkan diatas adalah cita-cita dan idealisme yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan menjadi komitmen dan tantangan bagi segenap Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan;
2. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
3. Mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
5. Meningkatkan peran ekosistem pendidikan;
6. Mewujudkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan.

Indikator Kinerja Utama tahun 2022 sesuai Renstra Perubahan Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

TUJUAN		**Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua**
INDIKATOR TUJUAN		**Harapan Lama Sekolah**
SASARAN		**Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan**
INDIKATOR SASARAN		**1. Rata-rata Lama Sekolah**
		2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
NO	**PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA**
1	Program Aplikasi Informatika	Persentase cakupan layanan e-gov
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui hibah
		Persentase pelaksanaan penyaluran hibah bansos pendidikan
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang kompeten
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
		Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi
		Persentase angka partisipasi murni SD/MI
		Persentase angka partisipasi murni SMP/MTs
		Persentase angka partisipasi murni SMA/SMK/MA
		Persentase angka putus sekolah jenjang SD/MI
		Persentase angka putus sekolah jenjang SMP/MTs
		Persentase angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA
		Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta
		Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah
		Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus
		Persentase Sekolah terakreditasi A
		Persentase kelulusan jenjang SD/MI
		Persentase kelulusan jenjang SMP/MTs
		Persentase kelulusan jenjang SMA/MA
		Persentase kelulusan jenjang SMK
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SD/MI
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMP/MTs
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMK
		Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan (SNP)
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan (SNP)
		Indeks kepuasan pelayanan kantor

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan target untuk masing- masing sasaran yang harus dicapai, Perjanjian Kinerja *(Performance Agreement)* 2022

memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang disertai dengan indikator sasaran. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Penetapan Indikator Perjanjian Kinerja (PK) dipresentasikan dan tertuang didalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai target kinerja, dimana di dalamnya memuat indikator kinerja serta terdapat sasaran strategis maupun indikator kinerja termasuk target capaian untuk masing-masing indikator kinerja. Berikut ini program kegiatan yang tertuang di dalam Indikator Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2022, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

TABEL 2.2 INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS										
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka yang menunjukkan rata-rata penduduk jakarta untuk menempuh pendidikan / bersekolah	N/A	N/A	N/A	13,07	13,08	Tahun
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	1	Rata-rata Lama Sekolah	Angka yang menunjukkan rata-rata penduduk jakarta untuk menempuh pendidikan / bersekolah	N/A	N/A	N/A	11,2	11,2	Tahun
3	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a, Penyerapan Anggaran, b, Efisiensi, c, Pencapaian output, Formulasi pengukuran: 1, Serapan Anggaran =80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2, Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3, Serapan Anggaran =80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan	1	Persentase penyelesaian Perluasan Akses	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
	keberdayaan yang berkualitas bagi semua		Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (KSD Nomor 1)	KSD mengenai Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (Nomor 1)						
		2	Persentase penyelesaian Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (KSD Nomor 3)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (Nomor 3)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (KSD Nomor 5)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (Nomor 5)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (KSD Nomor 6)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (Nomor 6)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		5	Persentase penyelesaian Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
			Kesejahteraan Guru PAUD (KSD Nomor 8)	Kesejahteraan Guru PAUD (Nomor 8)						
		6	Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (Nomor 12)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KSD Nomor 13)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Nomor 13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (Nomor 14)	100%	N/A	100%	100%	100%	Persentase
7	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Persentase penyelesaian Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan,	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
			Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (KSD Nomor 15)	dan Pemenuhan Pasokan Pangan (Nomor 15)						
8	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian Sekolah Kolaborasi (KSD Nomor 37)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Sekolah Kolaborasi (Nomor 37)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Nomor 38)	N/A	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan	1	Persentase penyelesaian	Realisasi penyelesaian dibandingkan target	N/A	N/A	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
	daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi		Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43)	penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Smart City (Nomor 43)						
		2	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
	SASARAN KHUSUS							,		
11	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah target pendidik yang mengikuti pelatihan di P2KPTK2	N/A	50%	N/A	100%	100%	Persen
12	Meningkatkatnya akses Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik	Jumlah peserta didik PAUD yang terdaftar di DAPODIK dibagi jumlah seluruh peserta didik PAUD	N/A	N/A	N/A	82	82	Persen
13	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Persentase Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha / Dunia Industri	Jumlah lulusan SMK yang diterima didunia kerja dan berwirausaha dibagi jumlah seluruh lulusan SMK dikurang jumlah yang melanjutkan pendidikan	35%	45%	55%	65%	65%	Persen
14	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Jumlah realisasi hari pelaksanaan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	10	10	20	Hari
15	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel	1	Jumlah kolaborator Jakarta	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam	N/A	N/A	N/A	50	50	Kolaborator

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
	dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi			melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan bersifat partisipasi)						
16	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	Rerata persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik	N/A	N/A	N/A	30	30	Persen
17	Terbentuknya Ekosistem Pendidikan yang berbasis digital dan terintegrasi	1	Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi	Jumlah aplikasi bantuan sosial pendidikan yang diintegrasikan	N/A	N/A	N/A	2	2	Aplikasi
18	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%, Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100	100	100	100	100	Persen
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK,	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))						
20	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah, Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi, c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik, d) Persentase teRp.ublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang, Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				program umum per triwulan, b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan, c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan, d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan),						
21	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	91	91	Predikat
22	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah, Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB						
23	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang teRp.roses / terdisposisi	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / teRp.roses pada hari yang sama, Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office", Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD,	100	100	100	100	100	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
				Jumlah surat belum terdisposisi / teRp.roses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut,						
24	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office, Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office, Jumlah perbal yang teRp.roses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD,	75	90	100	100	100	100
SASARAN OPERASIONAL										
25	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen
26	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Jak Survei	100	100	100	100	100	Persen
27	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Ket
					I	II	III	IV		
28	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

TABEL 2.3 INDIKATOR PROGRAM BERDASARKAN RENSTRA AWAL DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018-2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan	persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	83,07	86,35	89,63	92,91	96,19	99,5
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	159	249	339	429	519	609
2	Program wajib belajar 12 Tahun	persentase angka partisipasi murni SD/MI	96,15	96,54	96,93	97,32	97,71	98,1
		persentase angka partisipasi murni SMP/MTs	84,79	86,73	88,67	90,62	92,59	94,5
		persentase angka partisipasi murni SMA/SMK/MA	71,87	74,65	77,42	80,2	82,95	85,75
		persentase angka putus sekolah jenjang SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		persentase angka putus sekolah jenjang SMP/MTs	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03	0,01
		persentase angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA	0,36	0,29	0,22	0,15	0,08	0,01
		rata-rata lama sekolah penduduk jakarta	10,88	11,1	11,32	11,55	11,77	12
		persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	100	100	100	100	100	100
3	Program pendidikan Khusus dan layanan Khusus	persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	49,04	61,8	74,54	87,28	100	100
4	Program Peningkatan mutu pendidikan	persentase Sekolah terakreditasi A	0	70,03	77,52	85,02	92,51	100
		persentase kelulusan jenjang SD/MI	100	100	100	100	100	100
		persentase kelulusan jenjang SMP/MTs	99,98	100	100	100	100	100
		persentase kelulusan jenjang SMA/MA	99,99	100	100	100	100	100
		persentase kelulusan jenjang SMK	99,98	100	100	100	100	100
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SD/MI	62,32	66,85	67,63	68,41	69,19	70
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMP/MTs	61,31	66,04	67	68	69	70
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA	70,11	72	74	76	78	80
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMK	61,57	66,25	67	68	78	80
5	program pengembangan Guru dan Tenaga kependidikan	persentase guru yang kompeten	72,16	77,72	83,28	88,84	94,4	100
6	Program peningkatan sarana dan	Persentase sekolah yang memiliki sarana dan praasarana sesuai standar nasional pendidikan (SNP)	81,3	85,04	88,78	92,52	96,26	100
7	Program peningkatan dan pengelolaan kantor urusan pendidikan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4
8	Program pengelolaan kendaraan operasional urusan pendidikan	Indeks kepuasan pelayanan kantor	4	4	4	4	4	4

Sehubungan pada tahun 2021 terjadi perubahan pada Renstra Dinas Pendidikan, maka indikator program menjadi sebagai berikut:

TABEL 2.4 INDIKATOR PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022
					TARGET
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase cakupan layanan e-gov	%	0	100
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui hibah	Orang	61216	60000
		Persentase Pelaksanaan Penyaluran Hibah Bansos Pendidikan	%	0	100
3	Program Pendidik dan Tenaga kependidikan	Persentase guru yang kompeten	%	72,16	77
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	%	72,16	100
4	Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	%	83,07	86,22
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi	Lembaga	159	871
		Persentase angka partisipasi murni SD/MI	%	96,15	98,10
		Persentase angka partisipasi murni SMP/MTs	%	84,79	89,25
		Persentase angka partisipasi murni SMA/SMK/MA	%	71,87	85,75
		Persentase angka putus sekolah jenjang SD/MI	%	0,01	0,01
		Persentase angka putus sekolah jenjang SMP/MTs	%	0,11	0,01
		Persentase angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA	%	0,36	0,05
		Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta	Tahun	10,88	11,20
		Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah	%	100	100
		Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus	%	49,04	100
		Persentase Sekolah terakreditasi A	%	0	72,54

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL	TAHUN 2022 TARGET
		Persentase kelulusan jenjang SD/MI	%	100	100
		Persentase kelulusan jenjang SMP/MTs	%	99,98	100
		Persentase kelulusan jenjang SMA/MA	%	99,99	100
		Persentase kelulusan jenjang SMK	%	99,98	100
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SD/MI	Poin	70,11	80
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMP/MTs	Poin	62,32	70
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA	Poin	61,57	70
		Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMK	Poin	61,31	70
		Persentase sekolah yang memiliki sarana dan praasarana sesuai standar nasional pendidikan (SNP)	%	81,3	96,83
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pelayanan kantor	Index	4	4
		Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Index	4	4

BAB III

AKUNTABILITAS

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

   Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

TABEL 3.1 REALISASI CAPAIAN 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07	13,08	100,08%
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,20	11,31	100,99%
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91,00	91,02	100,02%
4	Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (KSD Nomor 1)	Persen	100	100	100%
5	Persentase penyelesaian Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (KSD Nomor 3)	Persen	100	97,75	97,75%
6	Persentase penyelesaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (KSD Nomor 5)	Persen	100	96,39	96,39%
7	Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (KSD Nomor 6)	Persen	100	100	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase penyelesaian Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD (KSD Nomor 8)	Persen	100	100	100%
9	Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	Persen	100	100	100%
10	Persentase penyelesaian Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KSD Nomor 13)	Persen	100	100	100%
11	Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	Persen	100	100	100%
12	Persentase penyelesaian Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (KSD Nomor 15)	Persen	100	100	100%
13	Persentase penyelesaian Sekolah Kolaborasi (KSD Nomor 37)	Persen	100	95,93	95,93%
14	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Persen	100	100	100%
15	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja	Persen	100	100	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)				
16	Persentase penyelesaian Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43)	Persen	100	100	100%
17	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Persen	100	99,50	99,50%
18	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Persen	100	100	100%
Sasaran Khusus					
19	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	Persen	100	123,24	123,24%
20	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik	Persen	82	98,05	119,57%
21	Persentase Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha / Dunia Industri	Persen	65	70,07	107,80%
22	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Hari	20	20	100%
23	Jumlah kolaborator Jakarta	Kolaborator	50	74	148%
24	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	Persen	30	30,97	103,23%
25	Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi	Aplikasi	2	2	100%
26	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	39,79	39,79
27	Opini laporan keuangan daerah	Predikat	3	3	100%
28	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,	Persen	100	100	100%
29	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Predikat	91	93,79	103,07%
30	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Nilai	95	95,97	101,02%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Tahun 2022				
31	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang teRp.roses / terdisposisi	Persen	100	99,99	99,99%
32	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Persen	100	103,50	103,50%
Sasaran Operasional					
33	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%
34	Survei Kepuasan Masyarakat	Persen	100	83,84	83,84%
35	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	98,8	98,8%
36	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100%

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, sebagai berikut :

a. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada tahun 2022 target Harapan Lama Sekolah adalah 13,07 tahun dengan realisasi 13,08 tahun sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100,08%. Faktor pendorong keberhasilan capaian yaitu:

1) Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU.
2) Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
3) Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.
4) Pemberian bantuan sosial dana pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu:

1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp7.918.861.404.138,00 dan realisasi Rp7.603.282.897.674,00 atau 96,02% melalui anggaran Biaya Operasional Pendidikan yang terdapat didalam kegiatan:

a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp3.023.598.061.491,00 dan realisasi Rp2.920.080.701.495,00 atau 96,58%.
b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp1.799.865.369.973,00 dan realisasi Rp1.759.911.721.119,00 atau 97,78%.
c) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan anggaran Rp. 1,056,049,660,592 dan realisasi Rp1.005.271.376.903,00 atau 95,19%.
d) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp1.728.024.191.113,00 dan realisasi Rp1.626.583.246.168,00 atau 94,13%.
e) Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp. 74,812,856,854 dan realisasi Rp71.264.590.344,00 atau 95,20%.
f) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran Rp64.444.657.427,00 dan realisasi Rp61.350.929.229,00 atau 95,26%.
g) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp172.066.606.688,00 dan realisasi Rp158.820.332.416,00 atau 92,30%.

2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pagu Rp361.013.722.780,00 dan realisasi Rp361.011.070.000,00 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,99% melalui anggaran pelatihan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat didalam kegiatan:
   a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran Rp. 1,284,000,000 dan realisasi Rp1.284.000.000,00 atau 100%.
   b) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi dengan anggaran Rp359.729.722.780,00 dan realisasi Rp359.727.070.000,00 atau 99,99%.

3) Program Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp816.457.075.748,00 dan realisasi Rp810.766.633.600,00 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,30% melalui anggaran Bantuan Sosial seperti KJP Plus, KJMU, Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19 yang terdapat didalam kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat

Pelayanan Dasar dengan anggaran Rp816.457.075.748,00 dan realisasi Rp810.766.633.600,00 atau 99,30%.

4) Program Aplikasi Informatika dengan pagu Rp. 2,122,879,896 dan realisasi Rp. 2,055,000,000 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 96,80% melalui anggaran pengelolaan e-government yang terdapat didalam kegiatan pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 2,122,879,896 dan realisasi Rp. 2,055,000,000 atau 96,80%.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 6,752,487,299,335 dan realisasi Rp. 6,631,336,439,106 atau 98,21% melalui anggaran yang terdapat didalam kegiatan:
   a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2,800,000 dan realisasi Rp. 2,800,000 atau 100%,
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 6,658,430,609,110 dan realisasi Rp. 6,542,624,274,251 atau 98,26%,
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 13,584,645,887 dan realisasi Rp. 12,708,097,269 atau 93,55%,
   d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 24,983,392,877 dan realisasi Rp. 22,965,996,691 atau 91,93%,
   e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 2,289,447,981 dan realisasi Rp. 2,173,680,155 atau 94,94%,
   f) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp. 7,491,485,510 dan realisasi Rp. 6,491,602,097 atau 86,65%,
   g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 45,247,831,280 dan realisasi Rp. 43,969,624,436 atau 97,18%,
   h) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 457,086,690 dan realisasi Rp. 400,364,207 atau 87,59%.

b. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

   Pada tahun 2022, target Rata-rata Lama Sekolah adalah 11,20 tahun, dengan realisasi 11,31 tahun, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100,99%. Sama seperti keberhasilan Harapan Lama Sekolah, faktor pendorong keberhasilan capaian Rata-rata Lama Sekolah yaitu :

1) Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan.
2) Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

1) Program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp. 7,918,861,404,138 dan realisasi Rp. 7,603,282,897,674 atau 96,02% melalui anggaran Biaya Operasional Pendidikan yang terdapat didalam kegiatan:
   a) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp. 3,023,598,061,491 dan realisasi Rp. 2,920,080,701,495 atau 96,58%,
   b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp. 1,799,865,369,973 dan realisasi Rp. 1,759,911,721,119 atau 97,78%,
   c) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan anggaran Rp. 1,056,049,660,592 dan realisasi Rp. 1,005,271,376,903 atau 95,19%,
   d) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp. 1,728,024,191,113 dan realisasi Rp. 1,626,583,246,168 atau 94,13%,
   e) Pengelolaan Pendidikan Khusus dengan anggaran Rp. 74,812,856,854 dan realisasi Rp. 71,264,590,344 atau 95,20%,
   f) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran Rp. 64,444,657,427 dan realisasi Rp. 61,350,929,229 atau 95,26%,
   g) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp. 172,066,606,688 dan realisasi Rp. 158,820,332,416 atau 92,30%.

2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pagu Rp. 361,013,722,780 dan realisasi Rp. 361,011,070,000 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,99% melalui anggaran pelatihan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat didalam kegiatan:
   a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran Rp. 1,284,000,000 dan realisasi Rp. 1,284,000,000 atau 100%,
   b) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi dengan anggaran Rp. 359,729,722,780 dan realisasi Rp. 359,727,070,000 atau 99,99%.

3) Program Kesejahteraan Rakyat dengan pagu Rp. 816,457,075,748 dan realisasi Rp. 810,766,633,600 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,30% melalui anggaran Bantuan Sosial seperti KJP Plus, KJMU, Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam penanganan Covid-19 yang terdapat didalam kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dengan anggaran Rp. 816,457,075,748 dan realisasi Rp. 810,766,633,600 atau 99,30%.

Untuk menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah, Dinas Pendidikan juga melakukan inovasi yaitu Pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) yang diberikan kepada Peserta Didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun, dan Sekolah Net Zero Carbon sebagai pioneer gerakan besar menuju bangunan emisi rendah pertama atau bahkan mencapai neraca zero emisi yang menjadi percontohan bangunan masa depan untuk generasi muda yang berkonsep green building dan nyaman bagi peserta didik.

c. Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun 2022, target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 91%, dengan realisasi 91,02%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100,02%. Faktor pendorong keberhasilan capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu perencanaan dan pelaporan telah didukung oleh sistem informasi sehingga bersifat transparan dan akuntabel, serta penyerapan anggaran setiap program yang diatas 91%. Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu :

1) Program Aplikasi Informatika dengan pagu Rp. 2,122,879,896 dan realisasi Rp. 2,055,000,000 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 96,80% melalui anggaran pengelolaan e-government yang terdapat didalam kegiatan pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 2,122,879,896 dan realisasi Rp. 2,055,000,000 atau 96,80%,

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 6,752,487,299,335 dan realisasi Rp. 6,631,336,439,106 atau 98,21% melalui anggaran yang terdapat didalam kegiatan :
   a) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 2,800,000 dan realisasi Rp. 2,800,000 atau 100%,

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 6,658,430,609,110 dan realisasi Rp. 6,542,624,274,251 atau 98,26%,
c) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 13,584,645,887 dan realisasi Rp. 12,708,097,269 atau 93,55%,
d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 24,983,392,877 dan realisasi Rp. 22,965,996,691 atau 91,93%,
e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 2,289,447,981 dan realisasi Rp. 2,173,680,155 atau 94,94%,
f) Peningkatan Pelayanan BLUD dengan anggaran Rp. 7,491,485,510 dan realisasi Rp. 6,491,602,097 atau 86,65%,
g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 45,247,831,280 dan realisasi Rp. 43,969,624,436 atau 97,18%,
h) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 457,086,690 dan realisasi Rp. 400,364,207 atau 87,59%.

Keberhasilan pencapaian IKU Dinas Pendidikan, terutama pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga berkontribusi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manuasi (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan dimensi pengeluaran. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, IPM DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta dan capaian Nasional dari tahun 2018 hingga 2022 sebagai berikut:

TABEL 3.2 CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TAHUN 2018-2022

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				
	2018	2019	2020	2021	2022
DKI JAKARTA	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65
INDONESIA	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, BPS

Capaian IKU Penunjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (Sasaran Khusus dan Operasional).

Sasaran Khusus

d. Capaian indikator persentase pendidik yang mengikuti pelatihan

Pada tahun 2022, target persentase pendidik yang mengikuti pelatihan adalah 100%, dengan realisasi 123,34%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 123,34%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan yaitu pelaksanaan pelatihan yang dapat dilaksanakan secara hybrid, baik daring ataupun luring. Untuk kegiatan luring juga disediakan anggaran pelatihan untuk peningkatan kompetensi sehingga melampaui target.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pagu Rp. 361,013,722,780 dan realisasi Rp. 361,011,070,000 sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 99,99% melalui anggaran pelatihan untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat didalam kegiatan :

1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan dengan anggaran Rp. 1,284,000,000 dan realisasi Rp. 1,284,000,000 atau 100%,
2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi dengan anggaran Rp. 359,729,722,780 dan realisasi Rp. 359,727,070,000 atau 99,99%.

Disamping didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan pleatihan, Dinas Pendidikan juga melakukan sebuah inovasi untuk kegiatan pelatihan dengan mengembangkan sistem Jaklat yang merupakan sebuah sistem pengembangan profesional Guru DKI Jakarta.

e. Capaian indikator Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik

Pada tahun 2022, target Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik adalah 82%, dengan realisasi 98,05%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 119,57%. Faktor pendorong keberhasilan capaian Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik yaitu semakin meningkatnya kesadaran pengelola PAUD dalam perizinan sehingga semakin banyaknya jumlah PAUD resmi yang terdaftar di dalam sistem Dapodik dan EMIS Kementerian Agama.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp. 7,918,861,404,138 dan realisasi Rp. 7,603,282,897,674, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 96,02%, yang terdapat dalam kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp. 172,066,606,688 dan realisasi Rp. 158,820,332,416 atau 92,30%.

f. Capaian indikator Persentase Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha/ Dunia Industri

Pada tahun 2022, target Tingkat Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha/ Dunia Industri adalah 65% dengan realisasi 70,07%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 107,80%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Tingkat Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha / Dunia Industri yaitu tersedianya dukungan anggaran bagi kegiatan sertifikasi peserta didik dan semakin banyak peserta didik yang mengikuti sertifikasi, sehingga setelah lulus dari satuan pendidikan sertifikasi tersebut bisa digunakan pada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

Adapun program/ kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp. 7,918,861,404,138 dan realisasi Rp. 7,603,282,897,674, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 96,02%, yang terdapat dalam kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan anggaran Rp. 1,728,024,191,113 dan realisasi Rp. 1,626,583,246,168 atau 94,13%.

g. Capaian indikator Jumlah Hari Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV

Pada tahun 2022, target Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV adalah 20 Hari dengan realisasi 20 Hari, sehingga tingakt ketercapaian 100%. Faktor pendorong adalah tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi bersama antara Bidang Dinas, Suku Dinas, Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu program Pengelolaan Pendidikan dengan pagu Rp. 7,918,861,404,138 dan realisasi Rp. 7,603,282,897,674, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 96,02%, yang terdapat dalam kegiatan:

1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp. 3,023,598,061,491 dan realisasi Rp. 2,920,080,701,495 atau 96,58%,
2) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran Rp. 172,066,606,688 dan realisasi Rp. 158,820,332,416 atau 92,30%,

h. Capaian indikator Jumlah Kolaborator Jakarta

Pada tahun 2022, target jumlah kolaborator Jakarta adalah 50 Kolaborator dengan realisasi 74 Kolaborator, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 148%. Faktor pendorong keberhasilan adalah semakin banyaknya kolaborator aktif dibidang pendidikan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.

i. Capaian indikator Persentase Asesmen Kompetensi Minimum

Pada tahun 2022, target Persentase Asesmen Kompetensi Minimum adalah 30% dengan realisasi 30,97%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 103,23%. Faktor pendorong keberhasilan adalah semakin banyaknya satuan pendidikan yang telah mencapai angka minimum pada kategori literasi, numerasi dan karakter. Kedepannya juga perlu semakin ditingkatkan agar semakin bertambah banyak satuan pendidikan yang mencapai angka minimum pada kategori literasi, numerasi dan karakter.

j. Capaian indikator Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi

Pada tahun 2022, target Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi adalah 2 aplikasi dengan realisasi 2 aplikasi, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi yaitu dukungan integrasi data dari SKPD lain seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu: Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 2,122,879,896 dan realisasi Rp. 2,055,000,000, sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 96,80%.

k. Capaian Persentase Pemanfaatan E-Order

Pada tahun 2022, target indikator Persentase Pemanfaatan e-Order adalah 100% dengan realisasi 39,79%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 39,79%. Faktor penghambat keberhasilan capaian indikator persentase pemanfaatan e-order dikarenakan perhitungan jumlah realisasi SP2D rekening makan minum juga memperhitungkan anggaran makan minum di satuan pendidikan, sedangkan pada satuan pendidikan pencairan dana BOP dilakukan per triwulan, sehingga realisasi makan minum tidak bisa menggunakan sistem e-order yang harus dibayarkan maksimal 3 hari kerja. Untuk selanjutnya indikator ini perlu didiskusikan dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

l. Capaian indikator Opini laporan keuangan daerah

Pada tahun 2022, target indikator Opini laporan keuangan daerah adalah 3 (WTP) dengan realisasi 3 (WTP), sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Opini laporan keuangan daerah adalah penyajian data dan informasi dalam laporan keuangan dan laporan aset Dinas Pendidikan yang wajar dan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan dan standar pengelolaan barang milik daerah.

m. Capaian indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

   Pada tahun 2022, target indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tersusunnya paparan dan terpublikasinya program unggulan dan program umum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

n. Capaian indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022

   Pada tahun 2022, target Predikat SAKIP Perangkat Daerah adalah A (91) dengan realisasi AA (93,79), sehingga capaian ditahun 2022 adalah 103,07%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Tingkat Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 yaitu semakin baiknya pengimplementasian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan dokumen pendukung.

o. Capaian indikator Nilai PMPRB Perangkat Daerah

   Pada tahun 2022, target Nilai PMPRB Perangkat Daerah adalah 95 dengan realisasi 95,97, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 101,02%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Nilai PMPRB Perangkat Daerah yaitu semakin baiknya pengimplementasian Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan dokumen pendukung.

p. Capaian indikator Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang teRp.roses/ terdisposisi

   Pada tahun 2022, target Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses/ terdisposisi adalah 100% dengan realisasi 99,99, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 99,99%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses/ terdisposisi yaitu semakin tepat waktu proses disposisi yang diberikan oleh pimpinan terhadap surat atau nota dinas.

q. Capaian indikator Jumlah Perbal/ Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal

Pada tahun 2022, target Jumlah Perbal/ Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Perbal/ Produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal yaitu sistem yang memudahkan dalam pengusulan perbal/ produk hukum Dinas Pendidikan kepada unit kerja terkait, seperti biro koordinator dan biro hukum.

Sasaran Operasional

r. Capaian indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Pada tahun 2022, target indikator Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu semakin banyaknya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sesuai target.

s. Capaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat

Pada tahun 2022, target indikator Survei Kepuasan Masyarakat adalah 100% dengan realisasi 83,84%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 83,84%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Survei Kepuasan Masyarakat yaitu semakin baiknya pemberian layanan kepada masyarakat, yang kedepannya juga perlu semakin ditingkatkan agar tingkat kepuasan masyarakat terus meningkat.

t. Capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Pada tahun 2022, target indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah 100% dengan realisasi 98,8%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 98,8%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yaitu terselesaikan dengan tuntas hampir seluruh pengaduan masyarakat yang masuk ke Dinas Pendidikan.

u. Capaian indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Pada tahun 2022, target indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian ditahun 2022 adalah 100%. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

yaitu terselesaikannya seluruh Tindak Lanjut Arahan Gubernur bagi Dinas Pendidikan.

KSD yang menunjang pencapaian Indikator kinerja Dinas Pendidikan yaitu:

KSD Utama

a. Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (KSD Nomor 1) dengan 7 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
b. Persentase penyelesaian Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi (KSD Nomor 3) dengan 6 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 97,75%
c. Persentase penyelesaian Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan (KSD Nomor 5) dengan 7 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 96,39%
d. Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) (KSD Nomor 6) dengan 7 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
e. Persentase penyelesaian Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD (KSD Nomor 8) dengan 3 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
f. Persentase penyelesaian Sekolah Kolaborasi (KSD Nomor 37) dengan 9 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 95,93%

KSD Penunjang

a. Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12) dengan 5 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
b. Persentase penyelesaian Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KSD Nomor 13) dengan 2 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
c. Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14) dengan 1 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
d. Persentase penyelesaian Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (KSD Nomor 15) dengan 1 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%

e. Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38) dengan 1 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
f. Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39) dengan 8 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
g. Persentase penyelesaian Pengembangan Smart City (KSD Nomor 43) dengan 2 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%
h. Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) dengan 2 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 99,50%
i. Persentase penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63) dengan 1 renaksi dengan keseluruhan capaian renaksi 100%,

2. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2022 pada tabel berikut:

No	Tujuan	IKU	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022	
				Target	Realisasi	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,00	80,47	80,40	80,76	80,40	80,77				
2		Harapan Lama Sekolah	Nilai							13	13,07	13,07	13,08
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Skor EKPPD	Indeks	3,100	3,171	3,150	3,171	3,200	3,171				
4	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah	Persentase	11,10	11,04	11,32	11,11	11,55	11,17	11,19	11,20	11,20	11,31
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen					100	100	91	91,5	91	91,02

Pada Tahun 2018 hingga 2020 Dinas Pendidikan mengampu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Skor EKPPD sesuai tujuan SKPD pada Renstra Tahun 2018-2022. Pada realisasi indikator IPM tahun 2018 hingga 2020 terus meningkat tiap tahunnya dan selalu mencapai target dari yang telah ditetapkan. Begitupun dengan indikator skor EKPPD, realisasi tahun 2018 mencapai skor 3,17 dari target yang ditentukan sebesar 3,1. Capaian Tahun 2019 dan 2020 menggunakan angka realisasi tahun 2018 karena angka capaian belum terbit dari Kementerian Dalam Negeri.

Akan tetapi pada tahun 2021, berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan yang juga sesuai dengan arahan Asisten Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan tidak lagi mengampu Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan pada indikator tersebut terdiri lebih dari satu komponen pembentuk, sehingga tidak saja diampu oleh Dinas Pendidikan tetapi juga SKPD lain. Oleh sebab itu pada tahun 2021 Dinas Pendidikan mengampu indikator tujuan SKPD yaitu Harapan Lama Sekolah yang menjadi salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia dengan realisasi 13,08 tahun dari target tahun 2022 yaitu 13,07 tahun, sedangkan pada indikator tujuan skor EKPPD juga tidak digunakan lagi.

Pada Indikator Kinerja Rata-rata lama sekolah, realisasi tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, meskipun bila dibandingkan dengan target tahunan 2018 hingga 2020 realisasi berada dibawah target, dan pada tahun 2021 dan 2022 realisasi RLS melebihi target yang telah ditetapkan. Begitu juga pada indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi tahun 2020 hingga 2022 tercapai melebihi target yang ditetapkan.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100,08%	97,21%	2,79%
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah	100,99%	96,47%	3,53%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,02%	98,21%	1,79%

Berdasarkan data diatas, maka dapat dijabarkan efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut :

a. Pada indikator Harapan Lama Sekolah, realisasi kinerja adalah 13,08 tahun dari target 13,07 tahun, sehingga capaian kinerja sebesar 100,08%, dengan total penyerapan anggaran Dinas Pendidikan yang terdiri dari lima program yang mendukung capaian indikator sebesar 97,21%, sehingga terjadi efisiensi 2,79%,
b. Pada indikator Rata-rata Lama Sekolah, realisasi kinerja adalah 11,31 tahun dari target 11,20 tahun, sehingga capaian kinerja sebesar 100,99%, dengan total penyerapan anggaran Dinas Pendidikan yang terdiri dari tiga program, yaitu Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengelolaan Pendidikan, dan Program Kesejahteraan Rakyat yang mendukung capaian indikator sebesar 96,47%, sehingga terjadi efisiensi 3,53%,
c. Pada indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi kinerja adalah 91,02% dari target 91%, sehingga capaian kinerja sebesar 100,02%, dengan total penyerapan anggaran Dinas Pendidikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi dan Program Aplikasi Informatika yang mendukung capaian indikator sebesar 98,21%, sehingga terjadi efisiensi 1,79%.

4. Perbandingan dengan Target Nasional

   Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta juga dapat diperbandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi lain dengan hasil sebagai berikut:

   a. Pada Indikator Kinerja Utama Harapan Lama Sekolah tahun 2022, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 13,08 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 13,10 tahun, Ini berarti Harapan Lama Sekolah penduduk Jakarta mengenyam pendidikan formal adalah 13,08 tahun atau setara Diploma 1, sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk secara nasional untuk mengenyam pendidikan adalah 13,10 tahun atau juga setara dengan Diploma 1. Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta meningkat 0,08% dari capaian tahun 2022 yang sebesar 13,07 tahun, Faktor pendorong pencapaian indikator ini adalah tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran KJMU, tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang dari tahun sebelumnya, seperti KJP Plus dan Biaya Operasional Pendidikan, perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil capaian Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.5 PERBANDINGAN CAPAIAN HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2021 DAN 2022

Provinsi	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
	2021	2022
DKI JAKARTA	13,07	13,08
INDONESIA	13,08	13,10

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2022, BPS

b. Pada Indikator Kinerja Utama Rata-rata Lama Sekolah tahun 2022, capaian Provinsi DKI Jakarta adalah 11,31 tahun, sedangkan capaian nasional adalah 8,69 tahun. Ini berarti penduduk Jakarta rata-rata telah menamatkan pendidikan formal hingga kelas 11 jenjang Sekolah Menengah, serta mendekati target Pemerintah terkait Wajib Belajar 12 Tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah secara nasional adalah 8,69 tahun atau rata-rata penduduk secara nasional baru menamatkan pendidikan formal hingga kelas 8 jenjang Sekolah Menengah. Jelas bahwa capaian Rata-rata Lama Sekolah Provinsi DKI Jakarta berada diatas capaian nasional, sekaligus menjadi provinsi dengan peringkat pertama yang capaiannya tertinggi dibandingkan provinsi lain. Hasil capaian Rata – rata Lama Sekolah menurut Provinsi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.6 PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2021 DAN 2022

Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
	2021	2022
DKI JAKARTA	11,17	11,31
INDONESIA	8,54	8,69

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2022, BPS

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran berdasarkan Program yang Mendukung IKU Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

TABEL 3.7 ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,08	100,08%	Program Aplikasi Informatika	2,122,879,896	2,055,000,000	96,80%
							Program Kesejahteraan Rakyat	816,457,075,748	810,766,633,600	99,30%
							Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	361,013,722,780	361,011,070,000	99,99%
							Program Pengelolaan Pendidikan	7,918,861,404,138	7,603,282,267,174	96,02%
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,752,487,299,335	6,631,336,439,106	98,21%
							Jumlah	15,850,942,381,897	15,408,452,040,380	97,21%
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,20	11,31	100,99%	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	361,013,722,780	361,011,070,000	99,99%
							Program Pengelolaan Pendidikan	7,918,861,404,138	7,603,282,267,174	96,02%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
							Program Kesejahteraan Rakyat	816,457,075,748	810,766,633,600	99,30%
							Jumlah	9,096,332,202,666	8,775,060,601,274	96,47%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91	91,02	100,02%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6,752,487,299,335	6,631,336,439,106	98,21%
							Program Aplikasi Informatika	2,122,879,896	2,055,000,000	96,80%
							Jumlah	6,754,610,179,231	6,633,391,439,106	98,21%

Berdasarkan realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

TABEL 3.8 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100,08%	97,21%	2,79%
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara tuntas dan berkelanjutan	Rata-rata Lama Sekolah	100,99%	96,47%	3,53%
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,02%	98,21%	1,79%

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lima program di Dinas Pendidikan, yaitu Program Aplikasi Informatika, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengelolaan Pendidikan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

2. Realisasi Anggaran berdasarkan Program

TABEL 3.9 REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2,122,879,896	2,055,000,000	96,80%
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	816,457,075,748	810,766,633,600	99,30%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	361,013,722,780	361,011,070,000	99,99%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7,918,861,404,138	7,603,282,267,174	96,02%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,752,487,299,335	6,631,336,439,106	98,21%
Jumlah	**15,850,942,381,897**	**15,408,452,040,380**	**97,21%**

3. Realisasi Anggaran berdasarkan Unit Kerja

TABEL 3.10 REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DI DINAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2022

SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Pendidikan	15,077,365,229,319	14,667,189,853,202	97,28%
Pusat Data Dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan	3,974,894,201	3,900,660,334	98,13%
Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	4,431,145,360	4,367,589,883	98,57%
Pusat Pelayanan Pendanaan Personal Dan Operasional Pendidikan	2,725,663,251	2,683,499,314	98,45%
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan – Jakbar	6,864,065,845	6,767,734,858	98,60%
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan – Jakpus	7,088,144,720	6,991,820,580	98,64%
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan – Jaksel	5,851,505,781	5,790,919,650	98,96%
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan – Jaktim	6,824,107,110	6,727,492,557	98,58%
Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Kejuruan - Jakut & Kep,Seribu	5,486,169,372	5,386,815,236	98,19%
Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	10,454,257,333	9,610,792,177	91,93%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta	2,603,444,354	2,503,173,535	96,15%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta	1,321,492,943	1,142,091,911	86,42%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta	3,800,031,495	3,554,500,420	93,54%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta	6,331,873,371	5,625,088,865	88,84%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta	7,209,965,918	7,019,887,674	97,36%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta	2,277,638,271	2,081,037,694	91,37%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta	6,098,303,237	5,695,110,868	93,39%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta	2,029,876,631	1,768,505,816	87,12%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta	6,261,987,852	6,054,964,974	96,69%
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta	1,703,701,094	1,555,788,712	91,32%
Suku Dinas Pendidikan Kabupaten - Kep, Seribu	10,142,739,368	10,036,698,580	98,95%

SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota – Jakbar	63,476,764,004	60,588,630,509	95,45%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota – Jakpus	36,346,404,176	35,523,964,437	97,74%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota – Jaksel	62,828,725,234	61,063,360,906	97,19%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota – Jaktim	120,206,099,123	117,183,861,774	97,49%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota – Jakut	45,842,956,540	44,609,015,114	97,31%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jakbar	61,438,576,560	60,292,963,696	98,14%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jakpus	51,872,153,979	47,663,755,131	91,89%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jaksel	73,369,796,537	65,650,162,558	89,48%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jaktim	100,664,348,021	97,238,159,868	96,60%
Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota – Jakut	54,050,320,897	52,184,139,547	96,55%
Grand Total	15,850,942,381,897	15,408,452,040,380	97,21%

Dari hasil capaian tahun 2022, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan budaya kerja di Dinas Pendidikan yang dibuktikan dengan integritas, kolaboratif, akuntabel, inovatif dan berkeadilan. Integritas keselarasan antara target dengan realisasi seperti tercapainya target Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah untuk memastikan bahwa layanan pendidikan dapat dirasakan bagi seluruh warga Jakarta. Membangun kerjasama dan kemitraan yang efektif, baik antar SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat (LPMP Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta) dan dengan stakeholder pendidikan seperti Perguruan Tinggi, asosiasi profesi guru, Lembaga Pemerhati Pendidikan. Pekerjaan yang dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja yang dilaporkan setiap triwulan pada sistem e-SAKIP dan adanya Telaah DPA dan monitoring penyerapan anggaran yang membuat penyerapan anggaran tahun 2022 meningkat dari tahun 2021. Munculnya gagasan pembaharuan untuk meningkatkan mutu layanan seperti inovasi sistem pelatihan Jaklat, sekolah net carbon zero dan pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan berkeadilan untuk memastikan pendidikan dapat dirasakan secara merata bagi warga Jakarta melalui adanya jalur afirmasi yang dikhususkan bagi peserta didik dengan ekonomi menengah kebawah yang mendapatkan KJP Plus.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Perjanjian kinerja dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sesuai dengan Indikator Perjanjian Kinerja (IPK) yaitu dari 36 indikator, 35 indikator tercapai dengan tingkat ketercapaian antara 83% hingga 123%, sedangkan 1 indikator pada sasaran khusus yaitu indikator Persentase Pemanfaatan e-Order tingkat ketercapaian terendah yaitu 39%.

Pada indikator Persentase Pemanfaatan e-Order tingkat ketercapaian terendah yaitu 39% dikarenakan perhitungan jumlah realisasi SP2D rekening makan minum juga memperhitungkan anggaran makan minum di satuan pendidikan, sedangkan pada satuan pendidikan pencairan dana BOP dilakukan per triwulan, sehingga realisasi makan minum tidak bisa menggunakan sistem e-order yang harus dibayarkan maksimal 3 hari kerja.

Selain itu, kelima program di Dinas Pendidikan, yaitu Program Aplikasi Informatika, Program Kesejahteraan Rakyat, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengelolaan Pendidikan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi juga mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

B. SARAN

Demi menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada indikator Persentase Pemanfaatan e-Order dengan tingkat ketercapaian terendah yaitu 39%, perlu dilakukan koordinasi kembali dengan BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dan BPKD Provinsi DKI Jakarta agar anggaran yang masuk ke perhitungan e-Order adalah anggaran makanan minum di Dinas, Suku Dinas Pendidikan, UPT dan SMKN BLUD saja, tanpa memasukkan anggaran makan minum satuan pendidikan;
2. Perlu perencanaan yang baik sehingga penyerapan dilakukan secara optimal dan kualitas dapat tercapai;
3. Memaksimalkan segala pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan

membuat alternatif pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih efektivitas dan efisiensi berdasarkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nahdiana
NIP 196908061992021001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAHDIANA
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

NAHDIANA
NIP 196908061992012001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Nahdiana
NIP : 196908061992012001
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Keterangan
SASARAN STRATEGIS											
1	Terjaminnya Akses Layanan Pendidikan Yang Berkualitas Bagi Semua	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	e-SAKIP	Definisi: Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung dan didapatkan dari BPS. Metode Perhitungan: $HLS_0^i = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLSia= Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t Eit = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a+1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren Sumber Data: BPS	N/A	N/A	N/A	13,07	13,07	Tahun
2	Meningkatnya partisipasi disegala jenjang satuan pendidikan secara merata dan berkelanjutan	1	Rata-rata Lama Sekolah	e-SAKIP	Definisi: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Metode Perhitungan: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n} x_i$ Metode Penghitungan: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Sumber Data: BPS	N/A	N/A	N/A	11,2	11,2	Tahun
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur keseusaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 48%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + [(%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <=80% dan ouput <=100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <=100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan Nomor (5)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD Nomor (8)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD Nomor (8)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		4	Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Nomor (1)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) Nomor (1)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

		5	Persentase penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Nomor (6)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Nomor (6)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		6	Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi Nomor (3)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi Nomor (3)	100%	100%	100%	102%	100%	Persentase
		7	Persentase penyelesaian rencana aksi Sekolah Kolaborasi Nomor (37)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Sekolah Kolaborasi Nomor (37)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Nomor (13)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Nomor (38)	N/A	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City Nomor (43)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS												
10	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase pendidik yang mengikuti pelatihan	e-Kinerja	Jumlah pendidik yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah target pendidik yang mengikuti pelatihan di P2KPTK2	N/A	50	N/A	100	100	Persen
11	Meningkatnya akses Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik	e-Kinerja	Jumlah peserta didik PAUD yang terdaftar di DAPODIK dibagi jumlah seluruh peserta didik PAUD	N/A	N/A	N/A	82	82	Persen
12	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	e-Kinerja	Rerata persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik	N/A	N/A	N/A	30	30	Persen
13	Terbentuknya Ekosistem Pendidikan yang berbasis digital dan terintegrasi	1	Tersedianya Sistem layanan pendidikan berbasis digital dan terintegrasi	e-Kinerja	Jumlah aplikasi bantuan sosial pendidikan yang diintegrasikan	N/A	N/A	N/A	2	2	Aplikasi
14	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Persentase Keterserapan Kerja lulusan SMK di Dunia Usaha / Dunia Industri	e-Kinerja	Jumlah lulusan SMK yang diterima diduniа kerja dan berwirausaha dibagi jumlah seluruh lulusan SMK dikurang jumlah yang melanjutkan pendidikan	35%	45%	55%	65%	65%	Persen
15	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	Jumlah realisasi hari pelaksanaan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV	N/A	N/A	10	10	28	Hari
16	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	1	Jumlah kolaborator Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan berstatus partisipasi)	N/A	N/A	N/A	50	50	Kolaborator
17	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	**Formula Pengukuran :** Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order **Sumber Data :** Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Penyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

19	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase **tersusunnya strategi komunikasi** program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase **tersusunnya editorial plan** sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun editorial plan tingkat Provinsi. c) Persentase **tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.** d) Persentase **terpublikasikannya materi komunikasi** melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. **Penghitungan**: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSO) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
21	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	**Definisi :** Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. **Formula Pengukuran:** Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 **Sumber Data** : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB	N/A	N/A	N/A	35	95	Nilai
22	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penuntuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akun mempenguruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
23	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
SASARAN OPERASIONAL											
24	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan berikut arahan lainnya)) / Jumlah TL Arahan Gubernur] x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat] x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
26	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	Indeks

27	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang dikelima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Jakarta, 6 Februari 2022

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,

Nahdiana

NIP 196908061992012001

INOVASI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022



Aplikasi Jaklat (Jakarta Pelatihan) bagi Pendidik



Sekolah Net Zero Carbon



Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS)

PRESTASI DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022

Surat Pengakuan Greenship bagi Sekolah Net Zero Carbon
dari Green Building Council Indonesia

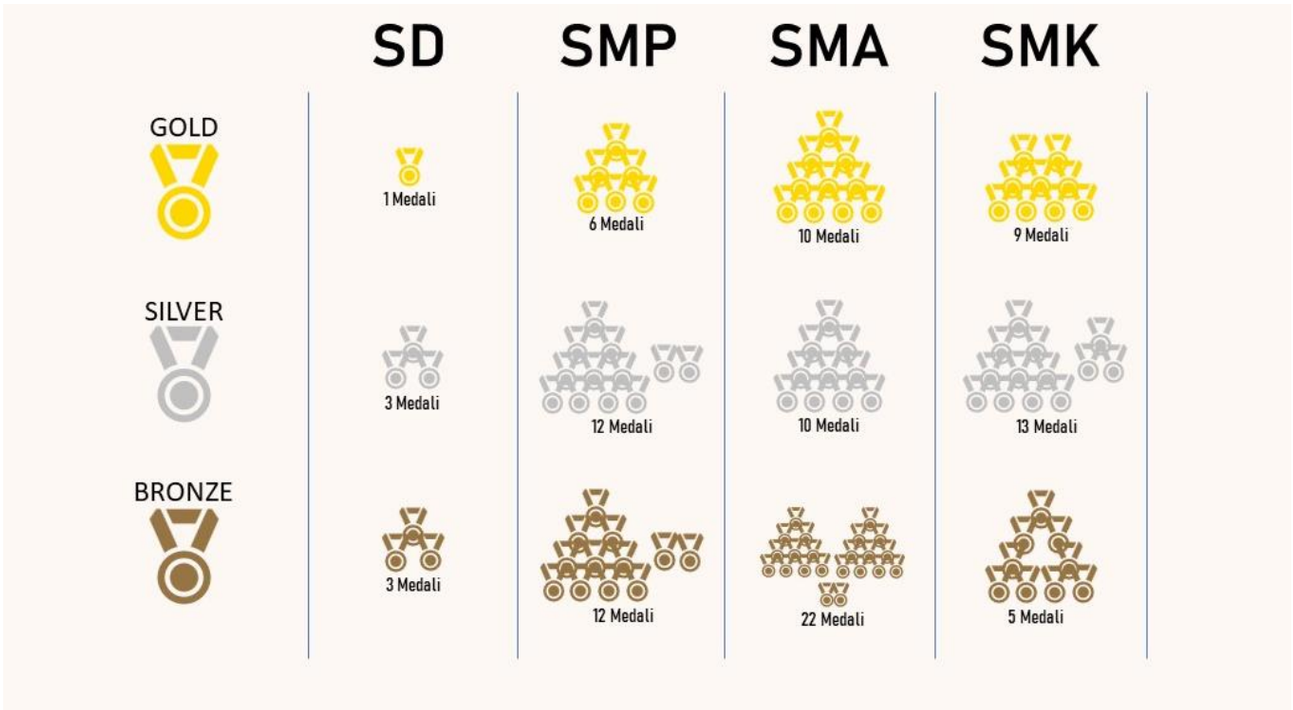








Prestasi Peserta Didik



Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2022



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI

Memberikan Penghargaan Kepada :

SDN CENGKARENG TIMUR 21 PAGI
KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2022

Berlaku sampai dengan November 2026

Jakarta, 24 November 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc



Piagam Penghargaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
NOMOR : SK.1176/MENLHK/P2SDM/SDM.2/11/2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
DAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI RI

Memberikan Penghargaan Kepada :

SDN KELAPA DUA WETAN 03 PAGI
KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA

Sebagai

SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL 2022

Berlaku sampai dengan November 2026

Jakarta, 24 November 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2023

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
selaku Ketua Tim Reviu

Agus Ramdani
NIP 197908141998031001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah	✓

		sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Jakarta, 31 Januari 2023

Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Selaku Ketua Tim Reviu

Agus Ramdani
NIP 197908141998031001